



LAPORAN KINERJA 2024

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 sehingga diharapkan laporan ini bisa memberikan manfaat khususnya terkait untuk pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Laporan ini disusun berdasarkan data capaian Tujuan, Sasaran, Program sampai Sub-Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam 1 (satu) tahun yang akan dilaporkan ke Bagian Organisasi dan akan dilakukan review oleh pihak Inspektorat.

Akhir kata, Kami berharap semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca khususnya Perangkat Daerah dan masyarakat selaku penerima layanan.

Surabaya, 10 Februari 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surabaya



Lasidi, S.T., M.T.

Pembina

197612252006041013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 3 (tiga) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2 Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
- 3 Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
- 4 Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing- masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	87.39	92.10	105.39%
2	Meningkatnya Jumlah Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor Baru	4.50%	4.98%	110.63%
3	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN	6%	6.47%	107.84%

Kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, Penelitian dan Pengembangan tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 19.381.216.869 - atau 88% dari total pagu anggaran sebesar Rp 22.148.249.254-.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, Penelitian dan Pengembangan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Gambaran Umum Dinas	2
I.3 Isu-Isu Strategis.....	6
I.4 Sistematika Penulisan	9
Bab II Perencanaan Kinerja.....	10
II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	10
II.2 Indikator Kinerja Utama	13
II.3 Perjanjian Kinerja.....	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja	15
III.1 Pengukuran Kinerja 2024	15
III.2 Analisis Capaian Kinerja	16
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	22
III.4 Akuntabilitas Anggaran	23
Bab IV Penutup	26
Lampiran.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Jumlah SDM	2
Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja	11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	14
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja	15
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	17
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan	20
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran	23
Tabel 3.5 Alokasi per Sasaran	24
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dengan anggaran	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Bagan Organisasi Perangkat Daerah	3
Gambar 3.1 Perbandingan Nilai SAKIP.....	18
Gambar 3.2 Grafik Capaian Investasi	22

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat dari

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan,
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024**, yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang sudah ada.

I.2 GAMBARAN UMUM DINAS

Tabel 1.1
Rekap Jumlah SDM di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya

NO	PENEMPATAN	STATUS	UNIT KERJA			TOTAL
			SEKRETARIAT	KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PENANAMAN MODAL	
1	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	PNS	14	9	9	32
		TENAGA KONTRAK	14	27	13	54
2	UPTSA PUSAT	PNS		2		2
		TENAGA KONTRAK		21		21
3	UPTSA TIMUR	PNS		1		1
		TENAGA KONTRAK		16		16
4	SPP TIJ	PNS		0		0
		TENAGA KONTRAK		3		3
5	SPP PAKAL	PNS		1		1
		TENAGA KONTRAK		3		3
6	SPP NAMBANGAN	PNS		1		1
		TENAGA KONTRAK		3		3
TOTAL			28	87	22	137

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya meliputi :

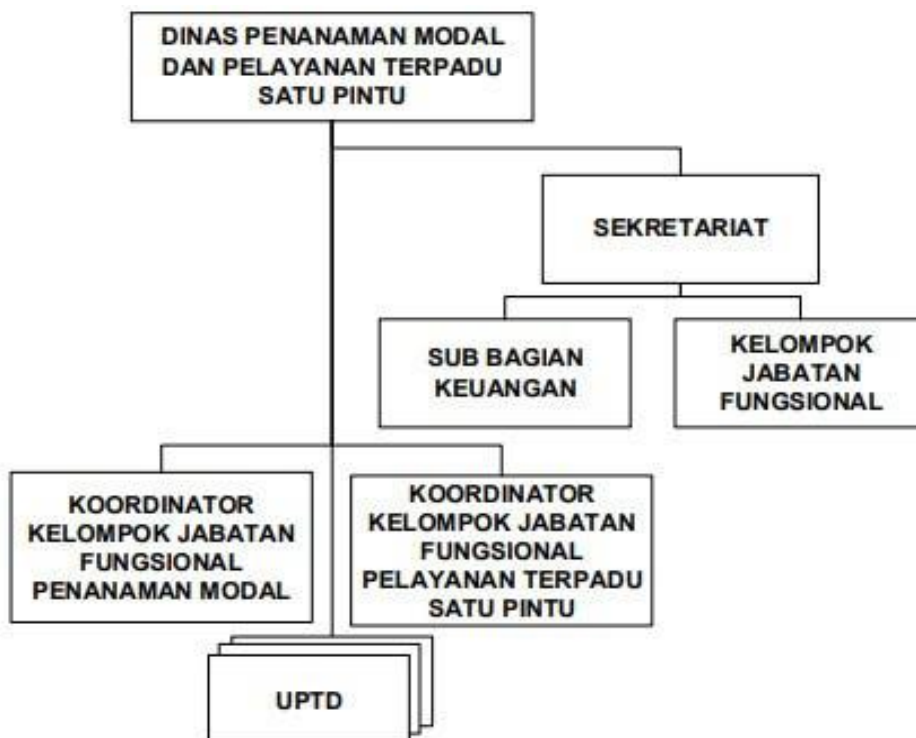
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Koordinator Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Sub Koordinator Data, Informasi dan Promosi Penanaman Modal;
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan Potensi dan Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi :
 - 1) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha;
 - 2) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.3
Bagan Organisasi Perangkat Daerah



Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

- (1) Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/ informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
 - e. Pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
 - f. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - h. Pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
 - j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusahadan pelayanan non perizinan;
 - k. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
 - m. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
 - n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - o. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan Sekretariat ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Nomenklatur dan tugas Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

I.3 ISU-ISU STRATEGIS

- Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara bahwa proses layanan perizinan usaha dilakukan secara elektronik (online) melalui SSW (*Surabaya Single Window*) Alfa. Layanan yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*) Alfa diyakini akan menambah jumlah investasi di Surabaya, dikarenakan pelayanan publik yang cepat dan mudah merupakan bagian penting untuk menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi. SSW (*Surabaya Single Window*) Alfa merupakan sistem yang mendukung perizinan berusaha OSS (Online Single Submission) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kepastian hukum dalam berusaha merupakan hal yang penting untuk meningkatkan ekosistem investasi dan menjaga kualitas perizinan berusaha yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Permasalahan :

- a. Perlunya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa;
- b. Perlu peningkatan pelayanan dan integrasi sistem perizinan dan non perizinan.

Hambatan :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi terhadap pelayanan perijinan secara online;
- b. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) berbasiskan masyarakat (Community base development) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan

paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak pada masyarakat benar-benar dikedepankan;

- c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

Peluang :

- a. Adanya pelayanan perijinan melalui PTSP, MPP, SPP dan sistem *online* yang mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya;
- b. Adanya kemudahan dalam hal pelayanan publik yang akan mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota tujuan investasi.

Tantangan :

- a. Dengan adanya kemudahan pelayanan perijinan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya harus terus melakukan inovasi terkait dengan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana mengingat harapan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi;
- b. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Identifikasi faktor internal yaitu :

Kekuatan (*Strength*) :

- a. Kewenangan perijinan dan non perijinan sudah dipusatkan pada satu perangkat daerah melalui DPM-PTSP;
- b. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal;
- c. Kelengkapan sarana dan prasarana;
- d. Tersedianya sistem pelayanan perijinan secara elektronik;
- e. Tersedianya pengaduan perijinan secara *online* melalui media sosial dan aplikasi;
- f. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani

perijinan dan non perijinan;

g. Peta Potensi investasi.

Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Keterbatasan akses yang diberikan oleh BKPM RI sehubungan dengan belum sempurnanya aplikasi perijinan berusaha.

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*) :

- a. Surabaya sebagai pusat perdagangan Indonesia Timur yang dilengkapi dengan infrastruktur transportasi dan logistik;
- b. Sinergi dengan pelaku usaha dan instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung peningkatan investasi melalui kemudahan pelayanan perijinan dan optimalisasi pengawasan.

Ancaman (*Threats*)

- a. Perubahan regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait perijinan;
- b. Ketidaksesuaian perijinan yang diterbitkan dengan eksisting usaha yang ada dilapangan.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang pembuatan laporan serta gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini diuraikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai selama lima tahun.

B. Indikator Kinerja Utama

Pada sub bab ini diuraikan Indikator Kinerja Utama atau IKU yang berisi indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2024.

C. Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan Saran dari keseluruhan isi laporan yang relevan dengan pembahasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima Tahun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2021 -2026 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021– 2026. Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis (2021-2026) atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

VISI

” GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN”

MISI

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

2. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan :

- a. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif.

Sasaran :

- a. Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai visi dan misinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2024 menjalankan 2 Tujuan, 3 Sasaran, 6 Program, 7 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan, yaitu :

Tabel 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4				Indikator	Target 2024
Meningkatnya Investasi Daerah				Persentase Peningkatan Investasi Daerah	6.30%
	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP	87.39%
		Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%
		Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%
				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%

		Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi	100%
		Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen
		Tercapainya indikator perangkat daerah	Persentase capaian indikator perangkat daerah > 90%	98.43%
		Meningkatnya Jumlah Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor Baru	4.5%
		Meningkatnya Daya Tarik Iklim Investasi Daerah	Persentase Investor yang memiliki komitmen Investasi	55%
		Intensifikasi Kegiatan Promosi Investasi Daerah	Persentase keberhasilan kegiatan promosi yang menarik minat investor baru	100%
		Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Daerah	Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi yang diterbitkan	4 Dokumen
		Mempermudah Pelayanan Perizinan Investasi	Nilai Kepuasan Masyarakat	90.16%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan berusaha	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan	100%
		Meningkatnya Kepercayaan Investor terhadap Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan skala usaha investor PMA PMDN	6%

		Meningkatnya Kualitas Pendampingan Investor Terhadap Ketentuan Pemenuhan LKPM	Persentase Investor PMA PMDN yang melaporkan LKPM	62%
		Meningkatkan Kualitas pembinaan Investor dalam Pemenuhan LKPM	Persentase Investor PMA PMDN yang melaporkan LKPM setelah dibina	160 Perusahaan
		Intensifikasi Pengawasan Pemenuhan LKPM PMA PMDN	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan dalam Pemenuhan LKPM PMA PMDN	270 Pelaku Usaha
		Meningkatnya Akses Data Investasi Daerah	Persentase Akses Data Informasi Investasi	5%
		Pemutakhiran Data Investasi secara berkala	Jumlah Data Investasi yang dimutakhirkan	43.000 Data
		Terlaksananya Publikasi Data Investasi	Jumlah Data Investasi yang dipublikasikan	4 Data

II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya, sehingga dapat meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya

kinerja para karyawan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah. [688]	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA/PMDN.	%	Jumlah investor PMA/PMDN dengan Nilai Investasi di atas Rp. 10 Milyar pada t - Jumlah investor PMA/PMDN dengan Nilai Investasi di atas Rp. 10 Milyar pada (t-1) : Jumlah investor PMA/PMDN dengan Nilai Investasi di atas Rp. 10 Milyar pada (t-1)) x 100%.	Investor adalah PMA/PMDN dengan Nilai Investasi di atas Rp. 10 Milyar.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya Investor Baru. [689]	Persentase Peningkatan Investor Baru.	%	(Jumlah NIB terbit tahun (t) - Jumlah NIB terbit tahun (t-1) / Jumlah NIB terbit tahun (t-1)) x 100%.	Investor baru diukur dari NIB yang terbit tahun berjalan dengan nilai investasi Non-UMK (sesuai ketentuan berlaku).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. [904]	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hasil evaluasi Inspektorat Kota Surabaya.	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hasil evaluasi Inspektorat Kota Surabaya.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

II.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program atau Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	87.39
Meningkatnya Jumlah Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor Baru	4.5%
Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA/PMDN	6%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran Rp. 22.148.249.254,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berikut diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja program dan kegiatan serta uraian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappedalitbang Surabaya. Perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

III.1. PENGUKURAN KINERJA 2024

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 107,95% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Rincian hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tercantum pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				REALISASI	% CAPAIAN
				I	II	III	IV		
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	87.39	0	92.10	92.10	92.10	92.10	105.39%
2	Meningkatnya Jumlah Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor Baru	4.5%	N/A	N/A	N/A	4.98	4.98	110.63%
3	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN	6%	N/A	N/A	N/A	6.47	6.47	107.84%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja table diatas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan realisasi dibawah 100% sebanyak 0 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Di tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memiliki sebanyak 3 sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Jumlah Investor Baru dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investor Baru
3. Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN

Pada sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, indikator “Nilai SAKIP” menghitung Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hasil evaluasi Inspektorat Kota Surabaya.

Pada sasaran “Meningkatnya Jumlah Investor Baru”, indikator “Persentase Peningkatan Investor Baru” menghitung Investor baru diukur dari NIB yang terbit tahun berjalan dengan nilai investasi Non-UMK (sesuai ketentuan berlaku), dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{(\text{Jumlah NIB terbit tahun } (t) - \text{Jumlah NIB terbit tahun } (t-1))}{\text{Jumlah NIB terbit tahun } (t-1)} \times 100\%.$$

Pada sasaran “Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah”, indikator “Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN” menghitung Investor PMA/PMDN dengan Nilai Investasi di atas Rp. 10 Milyar, dengan formulasi perhitungan:

Jumlah investor PMA/PMDN dengan Nilai Investasi di atas Rp. 10 Milyar pada t - Jumlah investor PMA/PMDN dengan Nilai Investasi di atas Rp. 10 Milyar pada (t-1) : Jumlah investor PMA/PMDN. dengan Nilai Investasi di atas Rp. 10 Milyar pada (t-1)) x 100%

Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir	Progres Capaian
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	83.43	84.72	95.18	95.65	92.10	90,13	102.19%
2	Meningkatnya Jumlah Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor Baru	-	-	-	5.33 %	4.98 %	5%	99.6%
3	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN	-	-	-	9.52 %	6.47 %	7%	92.43%

Capaian indikator “Nilai SAKIP” di tahun 2024 sebesar 105.39%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 87.39 dan realisasi sebesar 92.10. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

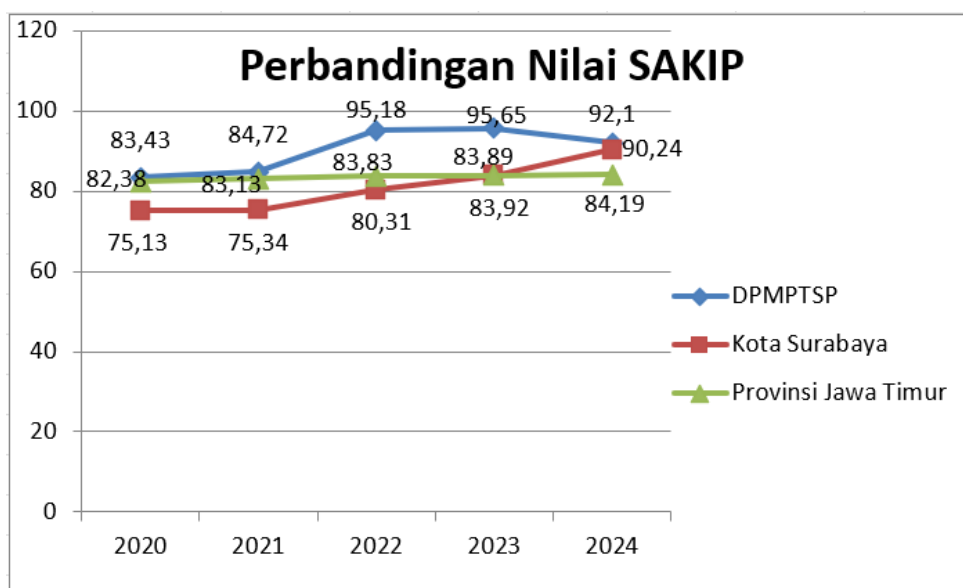
1. Komitmen dalam penyusunan dokumen secara tepat waktu
2. Komitmen melakukan pengukuran kinerja secara rutin
3. Pelaporan disajikan dengan baik dan berkualitas
4. Evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh

Berdasarkan Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan target akhir kinerja Kota Surabaya Tahun 2021-2026, progres capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mencapai 102.19% dan diprediksi akan mempertahankan capaian diatas 100% di tahun 2026.

Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kota Surabaya, akuntabilitas kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendapatkan predikat AA dengan nilai sebesar 92.10.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian, sebagai berikut:

Gambar. 3.1
Perbandingan Nilai SAKIP



Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya di tahun 2020-2023 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2024 terdapat penurunan dikarenakan realisasi kinerja. Sehingga dapat ditindak lanjuti perbaikan dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun.

Capaian indikator “Persentase Peningkatan Investor Baru” di tahun 2024 sebesar 110.63%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 4,5% dan realisasi sebesar 4,98%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pelaksanaan pameran disosialisasikan secara masif serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya memberikan layanan penerbitan NIB dan asistensi pengisian LKPM Online.
2. Pameran promosi investasi dan dilaksanakan dengan menampilkan

Peta Potensi investasi Kota Surabaya beserta feasibility studynya sehingga memudahkan Calon Investor / Investor untuk merencanakan investasi di Kota Surabaya.

3. Pameran promosi investasi dikemas secara menarik dan interaktif untuk bisa menarik pengunjung (calon investor/investor).

Berdasarkan Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan target akhir kinerja Kota Surabaya Tahun 2021-2026, progres capaian Sekretariat Daerah telah mencapai 99.6% dan diprediksi akan meningkatkan capaian sebesar 100% di tahun 2026.

Capaian indikator “Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN” di tahun 2024 sebesar 107.84%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 6% dan realisasi sebesar 6.47%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Inovasi Lapis Lupis (Layanan Asistensi Pengisian dan Fasilitasi LKPM untuk Peningkatan Investasi)
2. Klinik Investasi diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi
3. Kunjungan langsung kepada investor baru dalam rangka pendampingan sekaligus penyelesaian permasalahan terkait penanaman modal maupun perizinan

Berdasarkan Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan target akhir kinerja Kota Surabaya Tahun 2021-2026, progres capaian Sekretariat Daerah telah mencapai 92.43% dan diprediksi akan meningkatkan capaian sebesar 100% di tahun 2026.

Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terus mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung *refocusing* prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa:

1. penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
2. penghapusan mamin rapat internal;
3. sentralisasi anggaran perjalanan dinas di Bagian Umum, Protokol, Dan Komunikasi Pimpinan.

Dari upaya tersebut, telah terjadi efisiensi sebesar Rp.2.767.032.385,00. Keberhasilan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya ditunjang oleh 6 program dan 10 sub kegiatan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya didukung oleh alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah (DPAPD).

Adapun program, kegiatan dan anggaran yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	810.991.493
1.	Pengawasan Penanaman Modal	636.549.531
2.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	174.441.962
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.133.069.825
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.141.725
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.961.632.999
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.030.295.101
III	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.788.254.727
6.	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	807.301.130

7.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.980.953.597
IV	Program Promosi Penanaman Modal	703.622.653
8.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	703.622.653
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	151.239.222
9.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	151.239.222
VI	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	561.071.334
10.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	561.071.334
	TOTAL ANGGARAN	22.148.249.254

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu:

1. Efisiensi anggaran murni, meliputi kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa umum pelayanan kantor.
2. Mengembangkan Inovasi Investment Roadshow untuk dapat Meningkatkan Jumlah Investor Baru.
3. Perencanaan Inovasi Tim Percepatan Investasi Kota Surabaya untuk menjaga iklim investasi yang kondusif pada tahun 2025-2026.

III.3 PRESTASI KERJA LAINNYA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada tahun 2024 meraih predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman , dengan capaian nilai 97.90 (Tahun 2023) dan nilai 98,84.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya meraih penghargaan anugerah layanan investasi terbaik nomor satu (1) pada tahun 2024 dengan data yang diambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Capaian Investasi yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar. 3.2
Grafik Capaian Investasi



III.4 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, penyerapan belanja langsung sebesar 88% dengan rincian sebagai berikut :

Total Anggaran = Rp. 22.148.249.254,-

Realisasi Anggaran = Rp. 19.381.216.869,-

Realisasi anggaran secara keseluruhan untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN
I	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	810.991.493	748.683.541	92%
1.	Pengawasan Penanaman Modal	636.549.531	589.360.541	93%
2.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	174.441.962	159.323.000	91%
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.133.069.825	13.674.890.983	85%
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.141.725	112.437.240	80%
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.961.632.999	10.399.358.896	87%
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.030.295.101	3.163.094.847	78%
III	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.788.254.727	3.652.335.251	96%
6.	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	807.301.130	747.109.923	93%
7.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.980.953.597	2.905.225.328	97%
IV	Program Promosi Penanaman Modal	703.622.653	649.577.544	92%
8.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	703.622.653	649.577.544	92%
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	151.239.222	125.775.119	83%

9.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	151.239.222	125.775.119	83%
VI	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	561.071.334	529.954.431	94%
10.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	561.071.334	529.954.431	94%
	TOTAL ANGGARAN	22.148.249.254	19.381.216.869	88%

Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dapat dilakukan dengan membandingkan anggaran per sasaran strategis dengan anggaran keseluruhan. Anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	16.133.069.825	73%
2.	Meningkatnya Jumlah Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor Baru	3.788.254.727	17%
3.	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN	2.226.924.702	10%
	JUMLAH		22.148.249.254	100%

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.148.249.254 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 19.381.216.869 atau sebesar 88% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	87.39	92.10	105.39%	16.133.069.825	13.674.890.983	85%
Sasaran: Meningkatnya Jumlah Investor Baru	Persentase Peningkatan Investor Baru	4.5%	4.98%	110.63%	3.788.254.727	3.652.335.251	96%
Sasaran: Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN	6%	6.47%	107.84%	2.226.924.702	2.053.990.635	92%
		Rata- rata capaian		103,04%	Total Capaian		88%

Dengan capaian kinerja sebesar 103.04% dan capaian keuangan sebesar 88%, efisiensi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 15.04%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misinya dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisa Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 3 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Pohon Kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 telah mencapai target dengan pada 3 Sasaran Strategis tersebut.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan dalam Pohon Kinerja dapat tercapai dan realisasi anggaran sebesar Rp 19.381.216.869- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88% dari target anggaran sebesar Rp 22.148.249.254-.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LASIDI, S.T., M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERI CAHYADI

Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,

ERI CAHYADI

Surabaya, 23 September 2024

Pihak Pertama

LASIDI, S.T., M.T.

NIP 196405051992031009

**Laporan Kinerja (Pohon Kinerja)
Tahun 2024**

**PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah. [688]	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN.	6 %
2	Meningkatnya Investor Baru. [689]	Persentase Peningkatan Investor Baru.	4.5 %
3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. [904]	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	87.39

No	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pendampingan Investor Terhadap Ketentuan Pemenuhan LKPM.[107]	
2	Meningkatnya Lembaga Yang Memanfaatkan Data Investasi Daerah.[108]	
3	Meningkatnya Daya Tarik Iklim Investasi Daerah.[109]	
4	Mempermudah Pelayanan Perizinan Investasi.[110]	Rp 22.148.249.254
5	Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.[392]	
6	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.[452]	
		TOTAL Rp 22.148.249.254

Surabaya, 23 September 2024

WALIKOTA SURABAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ERI CAHYADI



LASIDI, S.T., M.T.
NIP 19640505199203

